

ABSTRAK
ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN BAKU ANTARA MASKAPAI
PENERBANGAN DENGAN PENGGUNA JASA PENERBANGAN

Transportasi udara (penerbangan) sebagai salah satu sub sektor transportasi yang termuda juga telah menunjukkan perkembangan yang sangat menakjubkan. Tiket yang berbentuk cetak, elektronik, atau bentuk lainnya, merupakan salah satu alat bukti adanya perjanjian angkutan udara antara penumpang dan pengangkut. Dalam tiket inilah dituangkan beberapa ketentuan berupa kewajiban bagi penumpang yang harus ditaati. Hal ini dapat dikategorikan sebagai perjanjian baku, karena merupakan perjanjian tertulis yang hanya dibuat oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perjanjian baku antara maskapai penerbangan dengan pengguna jasa penerbangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, pelaksanaan perjanjian baku antara maskapai penerbangan dengan pengguna jasa penerbangan sesuai dengan asas keseimbangan dalam hukum perjanjian serta perlindungan hukum bagi pengguna jasa penerbangan.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis* karena memberikan gambaran yang dipandang erat hubungannya dengan gejala yang diteliti. Kemudian data dianalisis dengan metode analisis kualitatif yaitu menganalisis data secara interpretatif menggunakan teori atau hukum positif kemudian secara induktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.

Hasil penelitian ini adalah pencantuman klausula baku yang tidak sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen dan UU Penerbangan. Adanya ketidakseimbangan dalam pelaksanaan perjanjian baku, dimana pihak penumpang dalam posisi yang lebih lemah. Perlindungan hukum terhadap penumpang adalah melalui berbagai peraturan perundangan dan melalui upaya hukum penyelesaian sengketa.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian baku antara maskapai penerbangan dengan pengguna jasa penerbangan belum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Kata Kunci: *perjanjian baku, perlindungan konsumen, penerbangan*

ABSTRACT
JURIDICAL ANALYSIS OF STANDARD AGREEMENT BETWEEN
AIRLINES COMPANY AND THE PASSENGER

Air transport (aviation) as one of the youngest transportation sub-sectors shows very amazing development. Tickets in the form of printed, electronic, or other forms are the evidence of air transport agreement between passengers and carriers. These tickets include some provisions in the form of obligations for passengers which must be obeyed. It can be categorized as a standard agreement because it is a written agreement which is only made by one of the parties in the agreement.

The aims of this research were to identify and analyze the implementation of standard agreement between airlines and flight service users in accordance with Republic Of Indonesia Regulation Number 8 Year 1999 on Consumer Protection and Republic Of Indonesia Regulation Number 1 Year 2009 on Aviation. The implementation of standard agreement between airline and flight service users was in accordance with the principle of balance in contract law and legal protection for the users of flight services.

The approach method used was empirical-Juridical, and the data was obtained from primary and secondary data. The type of this research was analytical-descriptive because it gives the description considered closely related to the symptoms investigated. Then, the data was analyzed using qualitative analysis, which analyzes the data interpretatively using the theories or positive law to be concluded inductively to answer existing problems.

The research results show the inclusion of standard clauses which are not in accordance with the Consumer Protection Law and the Flight Law. There is an imbalance in the implementation of the standard agreement in which passengers are in a weaker position. The legal protection of passengers is through various laws and legal efforts of dispute resolution.

Based on the research results, it can be concluded that the implementation of standard agreement between airlines and flight service users is not in accordance with the applicable legislations.

Keywords: Standard Agreement, consumer protection, Aviation